

ABSTRAK

Skripsi dengan Judul “Implementasi Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Perspektif Hukum Positif dan Siyasah Maliyah Studi Kasus di Desa Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro”, disusun oleh Sustiyaning Indah Erviana, NIM. 12103183002, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, yang dibimbing oleh Dr. Kutubuddin Aibak, S.Ag.,M.H.I.

Kata Kunci: Penggunaan Dana Desa, Hukum Positif, dan Siyasah Maliyah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan yang terjadi di desa Bareng berkaitan dengan proses penetapan prioritas penggunaan dana desa yang belum maksimal, terutama yang berkaitan dengan pembangunan jalan, pendidikan, tempat ibadah serta sarana dan prasarana kesehatan yang belum merata, serta penerapan sistem transparansi yang belum dijalankan dengan baik sehingga mengakibatkan miskomunikasi antara perangkat desa dan seluruh masyarakat desa terkait anggaran dana desa.

Fokus penelitian yang berkaitan tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa ini adalah 1) Bagaimana implementasi penetapan prioritas penggunaan dana desa di desa Bareng kecamatan Sekar kabupaten Bojonegoro? 2) Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap implementasi penetapan prioritas penggunaan dana desa di desa Bareng kecamatan Sekar kabupaten Bojonegoro? 3) Bagaimana tinjauan siyasah maliyah terhadap implementasi penetapan prioritas penggunaan dana desa di desa Bareng kecamatan Sekar kabupaten Bojonegoro?. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mendeskripsikan terkait implementasi penetapan prioritas penggunaan dana desa di desa Bareng kecamatan Sekar kabupaten Bojonegoro. 2) Untuk menganalisis tinjauan hukum positif terhadap implementasi penetapan prioritas penggunaan dana desa di desa Bareng kecamatan Sekar kabupaten Bojonegoro. 3) Untuk menganalisis tinjauan siyasah maliyah terhadap implementasi penetapan prioritas penggunaan dana desa di desa Bareng kecamatan Sekar kabupaten Bojonegoro.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris serta menggunakan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam dengan teknik analisis datanya menggunakan kondensasi data (*data condensation*), Penyajian data (*Data Display*), Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion drawing/ verifying*). Untuk pengecekan keabsahan datanya menggunakan triangulasi Sumber, triangulasi metode dan triangulasi teori.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa di desa Bareng terdapat berbagai permasalahan dan hambatan yang terjadi yaitu Kesesuaiannya kebijakan prioritas penggunaan dana desa yang dilakukan berdasarkan tiga poin penting dalam SDGs, pengurangan anggaran dana desa di masa Pandemi, keterlambatan dalam pencairan anggaran dana, kurangnya

partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program kerja pemerintah desa, penerapan sistem transparansi yang belum maksimal serta terjadinya rangkap jabatan antar perangkat desa Bareng. 2) Berdasarkan peraturan menteri desa PDTT nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021-2022, telah menetapkan bahwa anggaran di tahun 2022 nanti diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam. dengan menetapkan prioritas penggunaan dana desa tersebut disesuaikan dengan peraturan bupati Bojonegoro nomor 8 tahun 2021 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa untuk setiap desa di kabupaten Bojonegoro tahun 2021. 3) Berdasarkan Siyasa Maliyah terkait implementasi penetapan prioritas penggunaan dana desa di desa Bareng telah dilaksanakan penuh dengan tanggungjawab dalam menjalankan amanah-amanah yang diberikan untuk kemaslahatan masyarakat desa secara transparansi dan adil dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa berdasarkan peraturan yang telah ditentukan untuk mewujudkan tujuan di dalam SDGs tahun 2021. Meskipun ada beberapa permasalahan dan hambatan pula dalam penerapan tersebut, namun yang menjadi poin penting adalah amanah yang di emban oleh seorang pemimpin jangan sampai ditinggalkan.

ABSTRACT

Thesis with the title "Implementation of Priority Determination of the Use of Village Fund in a Positive Legal Perspective and Siyasaḥ Malīyah Case Study in Bareng Village, Sekar District, Bojonegoro Regency", compiled by Sustiyani Indah Erviana, NIM. 12103183002, Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia and Law, which is supervised by Dr. Kutbuddin Aibak, S.Ag., M.H.I.

Keywords: Use of Village Fund, Positive Law, and Siyasaḥ Malīyah

This research is motivated by the existence of problems that occur in the village of Bareng related to the process of setting priorities for the use of village fund that have not been maximized, especially those related to the construction of roads, education, places of worship, and health facilities and infrastructure that have not been evenly distributed, as well as the implementation of a transparency system that has not been implemented. Thus, there are miscommunication between village officials and the entire village community regarding the village fund budget.

The focuses of research related to setting priorities for the use of village fund are 1) How is the implementation of setting priorities for the use of village fund in Bareng village, Sekar sub-district, Bojonegoro district? 2) How is the positive law review on the implementation of setting priorities for the use of village fund in Bareng village, Sekar sub-district, Bojonegoro district? 3) How is the siyasaḥ malīyah review of the implementation of prioritizing the use of village fund in Bareng village, Sekar sub-district, Bojonegoro district?. The objectives of this research are 1) To describe the implementation of priority setting for the use of village fund in Bareng village, Sekar sub-district, Bojonegoro district. 2) To analyze the positive law review of the implementation of setting priorities for the use of village fund in Bareng village, Sekar sub-district, Bojonegoro district. 3) To analyze the siyasaḥ malīyah review of the implementation of setting priorities for the use of village fund in Bareng village, Sekar sub-district, Bojonegoro district.

This research uses qualitative research methods with empiris law and use case studies. The data collection methods used in this research was thorough observation, documentation, and in-depth interviews with data analysis techniques using data condensation, data display, conclusion drawing, and verification. To check the validity of the data using source triangulation, method triangulation, and theory triangulation.

The results of this study indicate those 1) In setting priority for the use of village fund in the village of Bareng, there are various problems and obstacles that occur, namely the suitability of the priority policy for the use of village fund based on three important points in the SDGs, reduction of the village fund budget during the Pandemic, delays in disbursing budget fund, lack of participation the community towards the implementation of the village government's work program, the implementation of a transparency system that has not been maximized and the occurrence of concurrent positions between village officials together. 2) Based on

the PDTT village minister regulation number 7 of 2021 regarding the priority of using village fund in 2021-2022, it has been determined that the budget in 2022 will be prioritized to finance activities that support the achievement of the Village SDGs related to national economic recovery activities, national priority programs and mitigation and management of natural and non-natural disasters. by setting priorities for the use of village fund in accordance with Bojonegoro regent regulation number 8 of 2021 concerning procedures for the distribution and determination of details of village funds for each village in Bojonegoro district in 2021. 3) Based on Siyasaah Maliyah regarding the implementation of prioritizing the use of village fund in Bareng village, carried out with full responsibility in carrying out the mandates given to the benefit of the village community in a transparent and fair manner in setting priorities for the use of village funds based on predetermined regulations to realize the goals in the 2021 SDGs. Although there are several problems and obstacles in the implementation, but the important point is that the trust carried by a leader should not be abandoned.

ملخص

البحث العلمي بعنوان "تنفيذ تحديد أولوية استخدام صندوق القرية في منظور قانوني إيجابي ودراسة حالة سياسات ماليا في قرية بارينغ ، مقاطعة سيكار ، بوجونيجورو ريجنسي" ، من إعداد سوسيتاني إنداه إيرفيانا ، نيم. ١٢١٠٣١٨٣٠٠٢ ، قسم القانون الدستوري ، كلية الشريعة والقانون ، الذي يشرف عليه الدكتور قطب الدين أيبك ، ش .

الكلمات الدالة: استخدام أموال القرية ، القانون الوضعي ، السياسة المالية

خلفية البحث هذا البحث هو وجود مشاكل تحدث في قرية بارينغ تتعلق بعملية تحديد الأولويات لاستخدام أموال القرية التي لم يتم تعظيمها ، خاصة تلك المتعلقة ببناء الطرق والتعليم ودور العبادة ، والمرافق الصحية والبنية التحتية التي لم يتم توزيعها بالتساوي ، وكذلك تنفيذ نظام الشفافية الذي لم يتم تنفيذه . وبالتالي ، هناك سوء تفاهم بين مسؤولي القرية ومجتمع القرية بأكمله فيما يتعلق بميزانية صندوق القرية .

مسائل البحث المتعلقة بتحديد الأولويات لاستخدام صندوق القرية هي (١) كيف يتم تنفيذ تحديد الأولويات لاستخدام صندوق القرية في قرية بارينغ ، منطقة سيكار الفرعية ، مقاطعة بوجونيجورو؟ (٢) كيف يتم مراجعة القانون الوضعي بشأن تنفيذ تحديد الأولويات لاستخدام صندوق القرية في قرية بارينغ ، منطقة سيكار الفرعية ، مقاطعة بوجونيجورو؟ (٣) كيف تتم مراجعة السياسة المالية لتطبيق ترتيب أولويات استخدام صندوق القرية في قرية بارينغ ، ناحية سيكار ، ناحية بوجونيجورو؟ . أهداف هذا البحث هي (١) وصف تنفيذ لتحليل (2) بجنغر الفرعية ، مقاطعة ثكر ، منطقة برنج تحديد الأولويات لاستخدام صندوق القرية في قرية مراجعة القانون الوضعي لتنفيذ تحديد الأولويات لاستخدام صندوق القرية في قرية بارينغ ، مقاطعة سيكار ، مقاطعة بوجونيجورو. (٣) لتحليل مراجعة السياسة المالية لتنفيذ تحديد الأولويات لاستخدام صندوق القرية في قرية بارينغ ، ناحية سيكار ، مقاطعة بوجونيجورو .

يستخدم هذا البحث طرق البحث النوعية مع نوع البحث في القانون المعيارى ويستخدم منهجًا استكشافيًا. كانت طرق جمع البيانات المستخدمة في هذا البحث هي المراقبة الشاملة والتوثيق والمقابلات المتعمقة مع تقنيات تحليل البيانات باستخدام تكثيف البيانات وعرض البيانات ورسم الاستنتاجات والتحقق. للتحقق من صحة البيانات باستخدام تثليث المصدر وطريقة التثليث والتثليث النظري.

مت العثور على نتائج الدراسة: (١) عند تحديد الأولوية لاستخدام صندوق القرية في قرية بارينغ ، هناك العديد من المشاكل والعقبات التي تحدث ، وهي ملائمة سياسة الأولوية لاستخدام صندوق القرية على أساس ثلاث نقاط مهمة في أهداف التنمية المستدامة ، والحد من ميزانية صندوق القرية أثناء الوباء ، والتأخير في صرف أموال الميزانية ، وعدم مشاركة المجتمع في تنفيذ برنامج عمل حكومة القرية ، وتنفيذ نظام الشفافية الذي لم يتم تعظيمه ، وحدث مواقف متزامنة بين مسؤولي القرية معًا. بناءً على لائحة وزير القرية رقم ٧ بشأن أولوية استخدام صندوق القرية في ٢٠٢١-٢٠٢٢ ، تم تحديد أولويات ميزانية فدتت لعام ٢٠٢١ في عام ٢٠٢٢ لتمويل الأنشطة التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للقرية المتعلقة أنشطة الانتعاش الاقتصادي الوطني ، والبرامج ذات الأولوية الوطنية والتخفيف من الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية وإدارتها. رقم ٨ لعام ٢٠٢١ بشأن إجراءات توزيع بجنغر من خلال تحديد أولويات استخدام صندوق القرية وفقًا للائحة سياسة ماليه فيما في عام ٢٠٢١. (٣) استنادًا إلى بجنغر وتحديد تفاصيل أموال القرية لكل قرية في منطقة يتعلق بتنفيذ إعطاء الأولوية لاستخدام الأموال القروية في قرية بارينغ ، والتي يتم تنفيذها بمسؤولية كاملة في تنفيذ التفويضات الممنوحة لصالح مجتمع القرية بطريقة شفافة وعادلة في تحديد الأولويات لاستخدام أموال على الرغم من . أهداف التنمية المستدامة القرية على أساس اللوائح المحددة مسبقًا لتحقيق أهداف ٢٠٢١ وجود العديد من المشاكل والعقبات في التنفيذ ، إلا أن النقطة المهمة هي أن الثقة التي يحملها القائد لا ينبغي التخلي عنها.